



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2023 telah selesai disusun.

Dokumen ini dibuat merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja ini penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan Tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022 disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dokumen ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan, proses penyusunan dilakukan secara sistematis disertai dengan kerangka pendanaan, yang indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam Dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkarya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam dapat tercapai.

Batam, Agustus 2023.

Inspektur Daerah Kota Batam,



Hendriana Gustini, S.Sos.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19680824 199008 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	II-1
2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2023.....	II-1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH.....	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah.....	III-1
3.2 Perubahan Belanja Inspektorat Daerah Tahun 2023.....	III-4
3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-4
BAB IV PENUTUP.....	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang bertugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Inspektorat Daerah.

Sesuai peraturan tersebut kedudukan Inspektorat Daerah adalah unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Batam.

Inspektorat Daerah merupakan institusi pemeriksa internal yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah lebih bersifat pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Batam demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk 1 (satu) tahun. Rancangan Rencana Kinerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama satu tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur Inspektorat Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran stratejik yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 20231 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Inspektorat

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat di tahun 2023;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Inspektorat agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat Daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah, keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH S.D. TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil renja Inspektorat Daerah sampai Triwulan II.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Inspektorat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah.

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pada Sub Bab ini berisikan anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah sebelum dan sesudah perubahan.

3.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2023

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Inspektorat Kota Batam tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2023. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah ditentukan oleh peraturan ini.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2023, telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah, dalam APBD Kota Batam tahun 2023 sebesar Rp27.248.548.049,00. Dengan realisasi per triwulan II sebesar Rp12.401.610.962,00 atau sekitar 45,51%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp25.992.311.869,00 dan triwulan II realisasi keuangan Rp11.819.383.922,00 atau sekitar 45.47%.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp204.868.000,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp60.0851.394,00 atau 29.70%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp164.790.500,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp111.441.980,00 atau 67.63%.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp134.879.680,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp65.972.216,00 atau 48.91%.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp180.580.000,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp86.977.700,00 atau 55.16%.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp195.373.500,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp95.066.000,00 atau 48.66%.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp51.682.500,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp17.680.000 atau 34.21%.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

- a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp324.062.000,00 dan per triwulan II realisasi keuangan sebesar Rp144.237.750,00 atau 44.51%.

Rekapitulasi Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari: *input*, *output* dan *outcome*. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja dari sebagian besar kegiatan .

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Batam Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Batam

Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6))	(9)	(10 (5+7))	(11 = (10/4*100))
	Usuran Wajib Non Pelayanan Dasar									
	Bidang/Usuran Pengawasan									
6.	01.	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	25%
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	-	100%	-	25%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	-
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	12 Dokumen	8 Dokumen	-
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	-	100%	100%	25%
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	70 orang	2 orang	-
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	-	100%	-	25%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	-	-	-	3 Paket	1 Paket	-

			Kantor	Disediakan								
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	-
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	60 kali	15 kali	-
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	-	-	-	100%	100%	25%
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	4 paket	4 paket	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 unit	3 unit	-
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 laporan	8 laporan	-
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 laporan	8 laporan	-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 laporan	8 laporan	-
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	-	-	-	100%	75%	25%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	45 Unit	45 Unit	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	93%	87%	-	-	-	87%	88.1%	21.75%
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%	100%	-	-	-	100%	58.33%	-
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	-	-	-	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	-

			BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
				Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100%	100%				100%	58.33%	25%
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	
			Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	-	-	-	-	25 laporan	25 laporan	
			Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	
			Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	-	-	-	-	1 Kesepakatan	-	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	75%	80%	-	-	-	80%	-	-
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP Reformasi Birokrasi dan Pengakuan Integritas	100%	100%	-	-	-	100%	0 %	25%
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	100%				100%	0 %	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%	100%	-	-	-	100%	0 %	25%
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	-
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	-	-	-	43 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	-

				Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	-	-	43 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---------------------	--------------------	---

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Pemerintah Kota Batam merujuk pada RPJMD adalah : “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi” dengan indikator tujuan ”Indeks Reformasi Birokrasi “. Tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Batam selaras dengan sasaran RPJMD yaitu: **“Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas”** dengan indikator tujuan adalah Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP. Untuk mencapai Tujuan Inspektorat tersebut dirumuskan dalam Sasaran inspektorat sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator :
 - Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat.
 - Nilai Kapabilitas APIP.
- b. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator :
 - Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi.
 - Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B.
- c. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator :
 - Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.0000)	Level 3 (3.1000)	Level 3 (3.1500)	Level 3 (3.2000)	Level 3 (3.2500)	Level 3 (3.3000)
1.1. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah		1.1.1. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat	58%	70%	81%	86%	93%	100%	
		1.1.2 Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
1.2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas		1.2.1. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	80%	81%	82%	83%	84%	85%	
		1.2.2. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B	70%	77%	81%	86%	93%	100%	
1.3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		1.3.1 Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	83,00%	83,20%	83,40%	83,60%	83,80%	84,00%	

APIP memiliki peranan yang vital dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dilingkungan pemerintah Kota Batam melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan maka setiap pelaksanaan audit harus taat kepada Standar Audit. Dengan demikian, siapapun Auditor yang melaksanakan Audit Intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit intern yang sama ketika Auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Pengawasan internal yang berkualitas merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Daerah Kota Batam dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities), dapat memberi peringatan dini (early warning system), efektivitas manajemen risiko dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

3.2 Perubahan Belanja Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Batam yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat dalam satu tahun mendatang. Rumusan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	P-RENJA 2023		RENJA 2023	P-RENJA 2023	RENJA 2023	P-RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INSPEKTORAT DAERAH						27.248.548.049	27,984,714,059	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	26.677.430.049		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	25.992.311.869	26,085,354,799	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang/bulan	90 orang/bulan	25,947,161,869	26,031,204,799	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9 Kegiatan	12 dokumen	45,150,000	54,150,000	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	204,868,000	616,624,000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 orang	78 orang	204,868,000	616,624,000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0	0	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	P-RENJA 2023		RENJA 2023	P-RENJA 2023	RENJA 2023	P-RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	164,790,500	364,107,500	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Jenis	0 Paket	0	0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3 paket	49,151,500	122,451,500	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket	0 paket	0	0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Jenis	0 paket	0	0	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis	1 paket	3,900,000	3,900,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Kali	12 Laporan	111,739,000	237,756,000	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	0	0	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	
		Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	0 paket	0	0	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	P-RENJA 2023		RENJA 2023	P-RENJA 2023	RENJA 2023	P-RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Jenis	0 Unit	0	0	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	134.879.680	138,259,760	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 jenis	12 Laporan	16.000.000	16.000.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 jenis	12 Laporan	36.000.000	36.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Orang	12 Laporan	82.879.680	86,259,760	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	180.580.000	182,580,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	149.930.000	151,930,000	
		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Jenis	0 Jenis	0	0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	30.650.000	30.650.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	-	Jumlah Gedung Kantor dan	0 Unit	0 Unit	0	0	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	P-RENJA 2023		RENJA 2023	P-RENJA 2023	RENJA 2023	P-RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kantor dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	88%	88%			
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal. 2. Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	88%	88%	195.373.500	195.373.500	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44 SKPD	12 Laporan	14.875.000	14.875.000	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 SKPD	1 Laporan	31.113.500	31.113.500	
		Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	44 SKPD	12 Laporan	20.055.000	20.055.000	
		Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	44 SKPD	2 Laporan	27.525.000	27.525.000	
		Kerjasama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4 Kali	1 Kesepakatan	93.675.000	93.675.000	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	2 Dokumen	8.130.000	8.130.000	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	P-RENJA 2023		RENJA 2023	P-RENJA 2023	RENJA 2023	P-RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	100%	100%	51.682.500	51.682.500	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Kali	1 Laporan	8.691.000	8.691.000	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Kali	1 Laporan	42.991.500	42.991.500	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas					
		Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	100%	0	0	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Kali	1 Rekomendasi	0	0	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	-	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Kali	1 Rekomendasi	0	0	
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%	100%	324.062.000	350,732,000	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	44 SKPD	43 Perangkat Daerah	15.100.000	15.100.000	

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (Outcome) / KEGIATAN (Output)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2023	P-RENJA 2023		RENJA 2023	P-RENJA 2023	RENJA 2023	P-RENJA 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah					
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 SKPD	43 Perangkat Daerah	22.782.000	22.782.000	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	44 SKPD	2 Kegiatan	286.180.000	312,850,000	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0 SKPD	0 Perangkat Daerah	0	0	
TOTAL							27.248.548.049	27,984,714,059	

3.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perubahan RKPD Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD 2023	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu P-RKPD 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
	INSPEKTORAT								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	26.677.430.049		100%	26.677.430.049	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Batam	100%	24.418.805.081	APBD	100%	24.418.805.081	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		90 Orang/bulan	25.947.161.869		90 Orang/bulan	25.947.161.869	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	45.150.000		12 Dokumen	45.150.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Batam	100%	204.868.000	APBD	100%	204.868.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		78 Orang	204.868.000		1 Paket	204.868.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	0		90 Orang	0	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perubahan RKPDP Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD 2023	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu P-RKPD 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	100%	164.790.500	APBD	100%	164.790.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	0		1 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Jenis	49.151.500		3 Paket	49.151.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	0		1 Paket	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	0		2 Paket	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Jenis	3.900.000		1 Paket	3.900.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180 kali	111.739.000		12 Laporan	111.739.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang terlaksana	Batam	100%	0	APBD	100%	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	0			0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0		Paket	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Jenis	0		24 Unit	0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Batam	100%	134.879.680	APBD	100%	134.879.680	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Jenis	16.000.000		12 Laporan	16.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		1 Jenis	36.000.000		12 Laporan	36.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perubahan RKPD Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD 2023	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu P-RKPD 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
		Disediakan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3 Orang	82.879.680		12 Laporan	82.879.680	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Batam	100%	180.580.000	APBD	100%	180.580.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	149.930.000		8 Unit	149.930.000	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Jenis			0 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		45 Unit	30.650.000		45 Unit	30.650.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0		1 Unit	0	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti		84 %			89 %		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	Batam	100%	195.373.500	APBD	100%	195.373.500	
		Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP							
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		20 SKPD	14.875.000		12 Laporan	14.875.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		44 SKPD	31.113.500		1 Laporan	31.113.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perubahan RKPd Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD 2023	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu P-RKPD 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		44 SKPD	20.055.000		12 Laporan	20.055.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		44 SKPD	27.525.000		2 Laporan	27.525.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		4 Kali	93.675.000		1 Kesepakatan	93.675.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		100 %	8.130.000		2 Dokumen	8.130.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	Batam	84 %	51.682.500	APBD	89 %	51.682.500	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		1 Laporan	8.691.000		1 Laporan	8.691.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		2 Kali	42.991.500		1 Laporan	42.991.500	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas		100%	324.062.000		100%	324.062.000	
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan		100%	0	APBD	100%	0	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		1 Kali	0		1 Rekomendasi	0	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1 Kali	0		1 Rekomendasi	0	
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah mendaftarkan hasil pendampingan dan asistensi	Batam	100 %	324.062.000	APBD	100 %	324.062.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan		44 SKPD	15.100.000		43 Perangkat Daerah	15.100.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perubahan RKPD Tahun 2023		Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU APBD 2023	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu P-RKPD 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	
		Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		44 SKPD	22.782.000		43 Perangkat Daerah	22.782.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		44 SKPD	286.180.000		2 kegiatan	286.180.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		0 SKPD	0		0 Perangkat Daerah	0	
TOTAL :					27.248.548.049			27,984,714,059	

4.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam pencapaian keberhasilan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera” maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

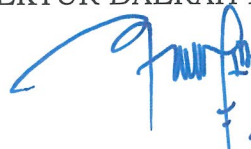
Penyusunan serta penetapan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja 2023 untuk mencapai target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra, Rancangan Perubahan Renja 2023 disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Kota Batam di bidang pengawasan akan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang, dan dengan ditetapkannya Perubahan Renja 2023 ini diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam dapat berjalan dengan baik.

Demikian Perubahan Rencana Kerja 2023 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Batam, Agustus 2023.
INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM,



Hendriana Gustini, S.Sos.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19680824 199008 2 001